

2022, Kemenkeu Kelola Aset Negara Rp 12.271,56 Triliun

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara mengelola aset negara hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp 12.271,56 triliun. Total aset yang dikelola tersebut meningkat 7,13% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 11.454,6 triliun.

Oleh Thomas Harefa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada tahun lalu kewajiban negara mencapai Rp 8.741,9 triliun dan ekuitas Rp 3.529,6 triliun. Sementara itu, dibandingkan dengan tahun 2015, Kemenkeu mengelola aset negara sebesar Rp 5.163,3 triliun, kewajiban Rp 3.493,5 triliun, dan ekuitas Rp 1.669,8 triliun.

"Total aset (tahun 2022) tersebut terdiri atas berbagai bentuk aset. Misalnya aset lancar, properti, aset tetap, dan aset lainnya. Aset tetap sebesar Rp 6.675,16 triliun, investasi jangka panjang Rp 3.772,75 triliun, aset lancar Rp 894,90 triliun, piutang jangka panjang Rp 53,59 triliun, properti investasi Rp 6,41 triliun, dan aset lainnya Rp 868,74 triliun," kata Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR mengenai evaluasi reformasi birokrasi Kemenkeu di Gedung DPR, Senin (27/3/2023).

Sri Mulyani juga menjelaskan, pada tahun lalu Kemenkeu mengelola pendapatan negara mencapai Rp 2.635 triliun pada 2022, "Ini (pendapatan negara) unaudited belum selesai diaudit dan realisasi belanja pada tahun lalu mencapai Rp 3.098 triliun," kata dia.

Sri Mulyani menambahkan pihaknya juga mengelola pembiaya-

Total Aset Negara yang Dikelola Kemenkeu Tahun 2022 (Rp Triliun)



Sri Mulyani Indrawati

an APBN sebesar Rp 590 triliun. Kemenkeu, juga mengelola defisit APBN dengan penuh kehati-hatian

dan risikonya turun hingga Rp 460 triliun pada 2022. "APBN sebagai instrumen fiskal dan instrumen pembangunan sangat menentukan dari output dan outcome, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan indeks kesejahteraan masyarakat."

Pada kesempatan itu, dia menjelaskan, total pegawai Kemenkeu saat ini sebanyak 78.492 pegawai. Jumlah itu terdiri atas 11.042 pejabat struktural, 14.746 pejabat fungsional, dan 52.704 pelaksana. Kemenkeu tersebar di seluruh Indonesia dan di beberapa kedutaan besar. Kemenkeu juga menjalankan 21 mandat undang-undang yang strategis, luas, dan kompleks.



Istimewa

Safari Ramadhan Dorong Pengusaha Gunakan Keuangan Syariah

Dari kiri ke kanan, Sekretaris Jenderal BPP HIPKA Ahmad Muntaha, Ketua Umum BPP HIPKA H. Kamrusamad, dan Bendahara Umum BPP HIPKA Muhammad Rafil Perdana berbicara di sela kegiatan Safari Ramadhan 1444 H yang diselenggarakan oleh BPP HIPKA di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023). Selain rapat pleno kedua bertajuk Efektifkan Organisasi Produktivitas Bisnis, juga dilakukan sosialisasi tentang peluang dan tantangan industri kelapa sawit nasional, serta mendorong pengusaha untuk menggunakan keuangan syariah. Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh dan pengusaha nasional seperti Soetrisno Bachir, Yugi Prayanto, Wisnu Pettalolo, Muhammad Toha, dan Ridwan Mustofa.

Aturan Simpan DHE di Domestik Terbit Sebelum Lebaran

JAKARTA, ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1/2019 terkait ketentuan penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri, pada April 2023 atau sebelum Lebaran 1444 H.

"Dalam waktu dekat kita akan realisasi, insyaallah sebelum Lebaran kita bisa selesaikan," kata Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3/2023) seperti dilansir Antara.

Disinggung mengenai apakah ada kewajiban agar ekspor mengkonversikan DHE ke rupiah dan disimpan di dalam negeri, Airlangga hanya mengatakan hal itu termasuk salah satu opsi.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah ingin agar 30% dari DHE sumber daya alam (SDA)

yang bernilai sama dengan atau lebih dari US\$ 250 ribu diwajibkan disimpan di rekening khusus dalam negeri selama 90 hari.

Hal itu sedang diupayakan pemerintah melalui revisi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Pengusahaan, Pengelolaan, Pengolahan Sumber Daya Alam. Upaya untuk menahak DHE di domestik tersebut untuk menambah manfaat ekonomi dari tren surplus neraca perdagangan akibat melonjaknya ekspor, sekaligus meningkatkan ketersediaan devisa di dalam negeri.

Untuk memberikan stimulus kepada ekspor agar DHE diparkir di domestik, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun BI telah menerbitkan instrumen operasi

moneter valuta asing (valas) dalam bentuk term deposit (TD) valas guna meningkatkan penempatan DHE, per 1 Maret 2023.

Instrumen TD Valas DHE tersebut memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di Bank Indonesia melalui bank yang ditunjuk (appointed bank) sesuai dengan mekanisme pasar. Per 1 Maret 2023, untuk tahap awal, terdapat 20 bank yang ditunjuk yang dapat menempatkan dana nasabah eksportir DHE melalui TD valas DHE di BI.

Penempatan pada instrumen tersebut memberikan beberapa kelebihan, yakni suku bunga valas yang kompetitif memperhatikan tiering nominal dan tenor, dan pengecualian dana dari komponen dana pihak ketiga (DPK) untuk perhitungan giro wajib minimum (GWM) dan rasio intermediasi makroprudensial (RIM). (th)

Financial statement table for PT PALMA SERASIH TBK DAN ENTITAS ANAK. Includes sections for Consolidated Financial Position (LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN), Consolidated Income Statement (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN), Consolidated Cash Flow Statement (LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN), and Consolidated Equity Statement (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN) for the period ending 31 December 2022.